

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Literatur

- Abdullah, Rozali. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggriani, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjahran. 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- _____. 1989. *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Farida, Maria. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____. dkk., 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanintyo Soemitro, Ronny . 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Persada.
- Harahap, Zairin. 2001. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Indroharto. 1993. *"Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____. 1993. *“Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Joeniarto. 1968. *Negara Hukum*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

Kansil, C.S.T. 1986. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara.

Marbun, S.F. 2002. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Prins, WF., dan R. Kosim Adisapoetra. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Prandya Paramita.

Prodjodikoro, Wirdjono. 1984. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: PT Ichtiar Baru.

Riawan Tjandra,W. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ridwan, HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Setiadi, Wicipto. 1994. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soehino. 1984. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.

Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soerjono. 1993. *Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa/ OOD dan Masalah Ganti Rugi*, dalam MA, Himpunan Karangan di Bidang Hukum Tata usaha Negara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Utrecht, E. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya Pustaka Tinta Mas.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

Keputusan Menteri Nomor 090/O/2004 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 43/G/2013/PTUN-SMG.

Makalah:

A Hamid S. Attamimi. *Perbedaan antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*. Makalah Pidato pada Dies Natalis PTIK Ke-46. (Jakarta 17 Juni 1992).